



Strategi Perguruan Tinggi Memajukan Lembaga Keuangan Syariah

Hamidulloh Ibda

STAINU Temanggung, Jawa Tengah

h.ibdaganteng@stainutmg.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas strategi perguruan tinggi dalam memajukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0. Selain memiliki kemampuan literasi baru, mahasiswa dan sarjana ekonomi syariah dituntut menguasai kompetensi abad 21. Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengacu studi kepustakaan. Dari hasil pembahasan, strategi perguruan tinggi dalam memajukan lembaga keuangan syariah terbagi atas jangka panjang dan pendek. Jangka panjangnya, perguruan tinggi menyiapkan sumber daya manusia berkualitas. Pertama, penguatan kurikulum mengacu KKNI-SNPT. Kedua, orientasi pembelajaran kontekstual di lapangan khususnya pada program studi ekonomi/ekonomi syariah yang bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Ketiga, sinergitas Otoritas Jasa Keuangan maupun Lembaga Keuangan Syariah dalam menguatkan training untuk trainer keuangan syariah. Keempat, kerjasama lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan di luar negeri. Jangka pendeknya perguruan tinggi menerapkan literasi keuangan pada mahasiswa untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Pertama, penguatan literasi keuangan pada wilayah aksi nyata. Kedua, penguatan literasi keuangan berbasis literasi baru yang menyasar pada kemampuan literasi data, teknologi, dan literasi manusia. Ketiga, memperbanyak kegiatan berupa sosialisasi, seminar, kuliah umum, atau berbasis praktik lapangan yang mengombinasikan kerjasama antara kampus, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah, dan dinas-dinas terkait. Keempat, inovasi berbasis riset pada produk-produk ekonomi syariah yang jarang dijamah. Seperti contoh wisata syariah (alam, religi, kuliner, budaya), perdagangan elektronik, dan lainnya. Kelima, kerjasama paten dan kontinu antara perguruan tinggi dan Lembaga Keuangan Syariah dengan membuat "simpanan mahasiswa". Keenam, basiswa pendidikan atau kredit pendidikan yang menjadi produk dari Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan Syariah, Revolusi Industri 4.0



Abstract

This article discusses the university's strategy in advancing Islamic Financial Institutions to responding the challenges of the Fourth Industrial Revolution era. In addition to having new literacy skills, Islamic economics students and scholars are required to master 21st century competencies. The method of writing this article uses a descriptive qualitative approach that refers to library research. From the results of the discussion, the university's strategy in advancing sharia financial institutions is divided into long and short term. In the long run, universities prepare quality human resources. First, strengthening the curriculum refers to KKNI-SNPT. Second, the contextual learning orientation in the field, especially in Islamic economics / economics study programs in collaboration with Islamic financial institutions. Third, the synergy of the Financial Services Authority and Islamic Financial Institutions in strengthening training for sharia financial trainers. Fourth, cooperation in sharia financial institutions or financial institutions abroad. In short, tertiary institutions apply financial literacy to students to increase inclusion of Islamic finance. First, strengthening financial literacy in the real action area. Second, strengthening new literacy-based financial literacy that targets data literacy, technology and human literacy capabilities. Third, increase activities in the form of socialization, seminars, public lectures, or field-based practices that combine collaboration between the campus, the Financial Services Authority, Islamic Financial Institutions, and related agencies. Fourth, research-based innovation on sharia economic products that are rarely addressed. For example sharia tourism (nature, religion, culinary, cultural), e-commerce, and others. Fifth, patent and continuous collaboration between universities and Islamic Financial Institutions by making "student savings". Sixth, educational scholarships or educational loans are products of the Islamic Financial Institutions itself.

Keywords: *University, Islamic Financial Institutions, the Fourth Industrial Revolution*

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi sangat berperan dalam memajukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik jangka panjang maupun pendek. Selain kegiatan akademik berupa pembelajaran, edukasi atau literasi keuangan, peran aktif warga kampus dalam mendukung kemajuan LKS sangat dibutuhkan. Selama ini praktik pembelajaran ekonomi syariah hanya diterapkan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan/program studi Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam, dan lainnya. Selain kampus yang tidak ada latarbelakang ilmu ekonomi syariahnya dinilai tidak wajib melakukan literasi dan inklusi keuangan syariah. Padahal lembaga tersebut sangat berperan melakukan penguatan literasi keuangan pada mahasiswa.

Literasi keuangan sangat strategis diterapkan kepada seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang keilmuwan mereka. Perguruan tinggi berperan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keuangan syariah berkualitas. Hal itu sangat strategis untuk mendorong akselerasi kemajuan LKS. Mengapa? Karena lulusan itu akan berkecimpung di LKS, baik bank maupun nonbank. Kampus berperan dalam mengedukasi, menyadarkan, menjadikan mahasiswa “melek” keuangan untuk bekal kehidupan mereka di masyarakat sekaligus meningkatkan inklusi atau penggunaan jasa keuangan syariah.

Perkembangan perbankan syariah tidak dapat berjalan sendiri. Perkembangan itu membutuhkan kerja keras dari seluruh *stake holders* industri keuangan syariah. Dibutuhkan sinergitas semua elemen untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Perlu keterpaduan langkah dari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan lebih efektif (Nofinawati, 2015: 182).

Langkah di atas sangat strategis diterapkan di abad 21 ini. Apalagi tantangan era Revolusi Industri 4.0 ini tidak hanya masalah perkembangan ekonomi global, namun juga penguatan literasi dan SDM. Perguruan tinggi baik negeri atau swasta selain dengan LKS harus bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjawab tantangan abad 21 ini. Khususnya dalam menyiapkan SDM keuangan syariah berkualitas dan implementasi literasi keuangan pada mahasiswa.

Pada Januari 2018, Indonesia melalui Kemristek Dikti mengundang perguruan tinggi terbaik di dunia untuk bekerja sama dalam meningkatkan mutu institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam agenda *The Education World Forum 2018: Global Summit for Education Minister*, di London, 25 Januari 2018, Kemristek Dikti mempersiapkan orientasi dan literasi baru dalam bidang pendidikan tinggi, terutama terkait erat persiapan SDM dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 (Yohanes Enggar Harususilo, 2018).

Sejak tahun 2015, Kemendikbud dan Kemristek Dikti sudah menggaungkan solusi untuk menjawab ketertinggalan bangsa ini dengan tiga pilar, yaitu kompetensi, karakter, dan literasi. Semua perguruan tinggi yang mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus mampu menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi, karakter, dan kemampuan literasi khususnya di bidang ekonomi syariah. Untuk itu dibutuhkan strategi yang relevan agar dapat mencetak SDM berkualitas dan berdaya saing di era Revolusi Industri 4.0 ini.

Era Revolusi Industri 4.0 tidak sekadar wacana. Akan tetapi sangat nyata dan harus dijawab bersama. Bao Xing dan Marwala (2016) dalam

buku *Implication of the Fourth Industrial Age on Higher Education* (Irawan, 2018, p. 6) menyatakan Revolusi Industri 4.0 merupakan penyatuan dunia *online* dengan industri produksi, sehingga merupakan revolusi industri digital. Revolusi Industri 4.0 dalam dunia bisnis berdampak pada pekerjaan masyarakat dan posisi dalam organisasi pada hari ini yang tidak akan ada lagi dalam 50 tahun ke depan. Revolusi Industri 4.0 mengintegrasikan rantai nilai vertikal dan horizontal dengan menghubungkan secara digital semua unit produktif dalam perekonomian.

Revolusi Industri 4.0 tidak boleh sekadar dipahami pada aspek disrupsi (ketercerabutan), otomatisasi dan hilangnya pekerjaan karena semua tergantung mesin. Akan tetapi tantangan Revolusi Industri 4.0 juga melahirkan peluang. Maka penguatan literasi baru menjadi keniscayaan (Ibda, 2018: 17). Jika dulu kaum terdidik hanya diwajibkan menguasai literasi lama (membaca, menulis, berhitung), namun era Revolusi Industri 4.0, akademisi termasuk di dunia ekonomi syariah diwajibkan menguasai literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia dilakukan berbagai program yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan lintas sektor. Permasalahan bersama yang dihadapi ketiga sektor keuangan syariah antara lain keterbatasan suplai produk syariah; keterbatasan akses akan produk keuangan syariah; masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat utilitas produk keuangan syariah; keterbatasan SDM; perlunya optimalisasi koordinasi dengan para pemangku kepentingan; serta perlunya kebijakan jasa keuangan yang selaras dan dapat saling mendukung perkembangan seluruh sektor keuangan syariah.

Dengan memperhatikan permasalahan itu, visi *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019* yaitu mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia (ojk.go.id, 2017). Untuk mewujudkan hal itu tentu membutuhkan sinergi semua elemen yang dapat dilakukan perguruan tinggi.

Dari *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, ada misi yang fokus harus dilakukan perguruan tinggi. Selain penguatan SDM di bidang ekonomi syariah, pada Misi 3 yaitu “Meningkatkan Inklusi Produk Keuangan Syariah dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan untuk Memperbesar Pangsa Pasar Keuangan Syariah” pada Program 1 Optimalisasi Promosi Keuangan Syariah ada anjuran untuk melakukan literasi keuangan.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan syariah menjadi faktor sangat penting dalam mendorong perkembangan keuangan syariah. Penggunaan suatu produk keuangan syariah oleh masyarakat sangat dipengaruhi tingkat pemahaman terhadap fungsi, jenis, dan karakteristik dari produk keuangan syariah. Hasil survei literasi OJK pada tahun 2016 menunjukkan, tingkat literasi (pemahaman) dan tingkat inklusi (pemanfaatan/utilitas) masyarakat tentang produk dan jasa keuangan syariah masih rendah.

Hal tersebut ditunjukkan dengan indeks literasi keuangan syariah baru mencapai sebesar 8,11% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 11,06%. Sementara indeks literasi keuangan konvensional mencapai 29,66% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%. Indeks inklusi keuangan syariah yang lebih tinggi dibandingkan indeks literasi menunjukkan masyarakat sudah menggunakan produk keuangan syariah walaupun belum memahami komprehensif tentang fitur produk, kemanfaatan serta risiko produk dan jasa keuangan syariah (OJK, 2017: 44).

Sementara pada Program 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berperan aktif dalam pengembangan dan operasional keuangan syariah. Hal ini mempengaruhi upaya pengembangan bidang lainnya seperti pengembangan produk dan layanan (OJK, 2017: 47).

Dari penjelasan di atas, perguruan tinggi sangat berperan dalam memajukan LKS menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 yang makin kompleks ini. Perlu strategi agar perguruan tinggi harus dapat menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi digital dan kemampuan literasi baru. Selain berperan menyiapkan SDM keuangan syariah berkualitas, perguruan tinggi dengan disiplin ilmu apa saja diharapkan dapat melakukan literasi keuangan pada mahasiswa.

Kemampuan literasi di abad 21 ini memang sangat berbeda. Jika literasi lama hanya sekadar membaca, menulis, berhitung sangat kurang karena era Revolusi Industri 4.0 menuntut mahasiswa mampu menguasai literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Semua perguruan tinggi harus merespon hal ini untuk menciptakan iklim ekonomi syariah yang maju di abad 21 ini. Jika kemampuan literasi secara akademik kuat, maka akan mendorong kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan produk keuangan syariah, baik secara lokal maupun nasional.

KAJIAN LITERATUR

Tantangan Lembaga Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0

Secara konseptual, embrio Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah dari sistem ekonomi syariah itu sendiri. Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan paradigma Islam. Pengembangan sistem ini tidak diperuntukkan bersaing atau mengalahkan tiga sistem ekonomi (kapitalis, sosialis, *mix conomic*) sebelumnya. Akan tetapi sebagai penacarian sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan ganda yang lebih banyak untuk menutupi kekurangan-kekurangan sistem ekonomi yang telah ada (Ghozali, 2018: 12).

Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah (Rahayu, 2005: 1). LKS merupakan lembaga, baik bank maupun nonbank yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya yang dalam pelaksanaannya diawasi Dewan Pengawasan Syariah (Muhammad Asidicky, 2017).

Penjelasan di atas menyaratkan LKS minimal memenuhi dua unsur. Mulai dari kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Selain itu, dalam praktiknya LKS harus mampu menyesuaikan zaman dengan tantangan yang ada. Di era yang semua hal tidak bisa lepas dari aktivitas keuangan, LKS memiliki tantangan pada aspek pengelolaannya yang harus benar-benar bersih dari praktik riba, *gharar* dan wajib memegang teguh prinsip Islam. Di sisi lain, SDM yang bekerja di LKS harus profesional karena berkaitan dengan hidup dan matinya LKS itu sendiri.

Data *Sharia Banking Statistik* sampai 2018 (OJK, 2018: 5-7), menyatakan Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah untuk Bank Umum Syariah, sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah seluruh Indonesia, Jawa Tengah dan DIY sendiri, bisa dilihat di bawah ini:

Tabel 1.

Jaringan Kantor Perbankan Syariah Bank Umum, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
467 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang	150 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang	101 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang

1.171 Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah	146 Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah	-
184 Kantor Kas	54 Kantor Kas	197 Kantor Kas

Sumber: Data OJK 2018

Tabel 2. Sebaran Jaringan Kantor Perbankan Syariah Bank Umum, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
454 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang	150 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang	604 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang
1.171 Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah	146 Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah	1.317 Kantor
184 Kantor Kas	54 Kantor Kas	238 Kantor Kas

Sumber: Data OJK 218

Tabel 3. Sebaran Jaringan Kantor Perbankan Syariah Bank Umum, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah dan DIY

Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah
Jateng: 37 Kantor Operasional/Kantor Cabang	Jateng: 19 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang
DIY: 9 Kantor Operasional/Kantor Cabang	DIY: 4 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang

Jateng: 86 Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah	Jateng: 17 Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah
DIY: 23 Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah	DIY: 5 Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan
Jateng: 15 Kantor Kas	Jateng: 10 Kantor Kas
DIY: 13 Kantor Kas	DIY: 4 Kantor Kas

Sumber: Data OJK 218

Dari total Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah untuk Bank Umum Syariah ditambah dengan bank konvensional yang membuka layanan syariah, tentu SDM kita memiliki potensi besar untuk terserap ke sana. Belum lagi potensi lowongan kerja di LKS nonbank yang berbentuk asuransi, Badan Amil Zakat (BAZ), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), pegadaian dan lainnya.

Tantangan pada LKS ini sekaligus tantangan dan peluang bagi perguruan tinggi pula. Kampus sebagai pencetak sarjana ekonomi diharap tidak sekadar membekali mahasiswa pada aspek kognitif (pengetahuan) saja, namun juga aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) yang menyesuaikan keterampilan abad 21 yaitu memahami literasi baru dan digitalisasi industri.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam diharapkan dengan lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan sistem LKS harus dikelola secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, LKS merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga (Lubis, 2004: 33).

Dalam aktivitasnya, LKS terdiri atas dua variabel, yaitu perbankan dan nonbank. Kategori nonbank yaitu lembaga zakat, lembaga *ijarah*, *kafalah*, *salam*, *rahn*, *akad*, *warits*, *qiradh*, *syirkah*, dan lainnya. Sementara kategori perbankan yaitu *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *bai'u bithaman ajil* dan lainnya.

Dalam perjalanannya, LKS mengalami kendala, terutama SDM yang mengisi pos-pos LKS tersebut. Selain harus bisa menerapkan sistem syariah dengan sebenarnya, SDM yang bergerak di bidang ekonomi syariah harus dapat menyesuaikan kemajuan zaman karena tantangan saat ini semakin kompleks dan harus disiapkan sejak dini.

SDM perbankan syariah saat ini masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas. Perguruan tinggi yang mengajarkan mengenai ekonomi syariah belum mampu menyediakan seluruh SDM dibutuhkan. Akhirnya, SDM itu harus dipasok perguruan tinggi umum. Seringkali terjadi dikotomi antara perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi umum. Apabila perguruan tinggi agama dalam pengajarannya lebih menekankan mengenai aspek fikih semata dan kurang materi praktisnya. Sedangkan perguruan tinggi umum terlalu banyak aspek praktisnya dan kurang materi fikih. Hal ini harus dipecahkan secara bersama bagaimana menyusun suatu kurikulum yang mampu memadukan antara kurikulum umum, fikih dan praktik (Al-Arif, 2012: 76).

Selain tantangan di atas, memasyarakatkan LKS di Indonesia sangat susah dan ada beberapa masalah mendasar yang saat ini dihadapi. Pertama, kekurangyakinan atau bahkan ketidakpercayaan sebagian besar umat Islam akan kelebihan LKS untuk mendatangkan cita-cita *rahmatan lilalamin*. Kedua, kelangkaan pengetahuan konseptual dan kekurangan informasi praktis mengenai lembaga-lembaga keuangan Islam. Ketiga, kekurangan bukti empiris atau contoh nyata yang bisa dijadikan sarana keyakinan umat mengenai keberhasilan lembaga keuangan Islam serta manfaatnya bagi umat (Muhammad, 2002: 145).

Selain masalah di LKS sendiri, tuntutan zaman semakin kompleks, khususnya di era Revolusi Industri 4.0 ini. Jika tahun 2015 kita dihadapkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka di tahun ini kita dihadapkan dengan Revolusi Industri 4.0. Era ini menuntut sarjana ekonomi harus berbeda dan unggul dibandingkan sarjana lain karena hanya mereka yang secara keilmuan lebih mumpuni bergerak di bidang ekonomi syariah.

Secara konseptual, definisi Revolusi Industri 4.0 masih berbeda-beda. Pasalnya, karena konsep ini masih diteliti para ilmuwan atau akademisi sesuai disiplin ilmu masing-masing. Irianto (2017) dalam karya *Industry 4.0; The Challenges of Tomorrow* (Yahya, 2018, p. 9) menjelaskan tantangan Industri 4.0 meliputi beberapa hal. Pertama, kesiapan industri. Kedua, tenaga kerja terpercaya. Ketiga, kemudahan pengaturan sosial budaya. Keempat, diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri 4.0 yaitu

inovasi ekosistem, basis industri yang kompetitif, investasi pada teknologi dan integrasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kewirausahaan.

Dari penjelasan di atas, tantangan LKS sekaligus menjadi tantangan perguruan tinggi. Revolusi Industri 4.0 mendatangkan tantangan mendasar di bidang ekonomi syariah. Mulai konsistensi melaksanakan prinsip dan praktik ajaran Islam, susah mencari pekerjaan karena sudah berkonversi ke digital, *disruption* (ketercerabutan), perdagangan dan transaksi keuangan yang mulai bebas, dan lainnya.

Untuk itu, perguruan tinggi khususnya yang menyelenggarakan program studi ekonomi/ekonomi syariah harus dapat menjawabnya. Perguruan tinggi terutama yang membuka prodi/jurusan ekonomi/ekonomi syariah harus merespon hal di atas dengan melakukan terobosan strategi. Mulai dari penyusunan kurikulum hingga pendampingan lulusan agar terserap di LKS dan LKS tersebut benar-benar menyaring SDM berkualitas yang kompatibel dengan keserjannya.

Perguruan tinggi sangat berperan dalam menyiapkan SDM ekonomi syariah berkualitas, berbeda, dan memiliki kompetensi digital di era Revolusi Industri 4.0 ini. Semua itu menjadi tugas berat perguruan tinggi terutama yang membuka program studi/jurusan atau yang serumpun dengan ilmu ekonomi/ekonomi syariah.

Tidak hanya berperan menerapkan menyiapkan SDM berkualitas, perguruan tinggi sangat strategis menerapkan literasi keuangan dan inklusi keuangan agar dapat memberi sumbangsih pada LKS. Perguruan tinggi juga berperan mengedukasi mahasiswa yang ke depan dapat berkecimpung di dunia perbankan syariah, baik terjun bekerja di perbankan syariah atau menggunakan jasa LKS.

PEMBAHASAN

Strategi Perguruan Tinggi Menyiapkan SDM Berkualitas

Jika dipetakan, strategi perguruan tinggi dalam memajukan LKS dapat dilakukan jangka panjang dan pendek. Jangka panjangnya, perguruan tinggi harus mendesain strategi baru dalam menyiapkan SDM berkualitas di bidang ekonomi syariah. Strategi utama perguruan tinggi penyelenggara program studi ekonomi/ekonomi syariah adalah menyiapkan SDM yang berkualitas sesuai capaian pembelajaran dan profil lulusan yang mereka buat dengan menyesuaikan zaman. Hal itu sudah sesuai prinsip pengembangan kurikulum perguruan tinggi yang mengacu pada KKNI-SNPT (SN Dikti) sesuai Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 yang memberikan kewenangan perguruan tinggi mengembangkan kurikulumnya sendiri. Maka semua perguruan tinggi pengelola

prodi/jurusan ekonomi/ekonomi syariah harus memberikan daya tawar berbeda dengan yang lain.

Penyiapan SDM ekonomi syariah berkualitas tidak terpatri pada perguruan tinggi atau fakultas, melainkan pada prodi/jurusan. Indikator prodi berkualitas atau tidak adalah pada akreditasi, kurikulum, dosen, mutu pembelajaran, karya dan prestasi mahasiswa, keterserapan lulusan pada *user* (pemakai), dan kepercayaan masyarakat pada prodi tersebut dan kualitas secara umum dalam Tri Darma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi negeri atau swasta hakikatnya sama, karena yang paling penting saat ini adalah akreditasinya, tidak sekadar gedung dan namanya saja.

Dari tahun ke tahun, program studi di bidang ilmu Ekonomi atau Ekonomi Islam semakin banyak. Secara kuantitas, jumlah ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan berat. Mengapa? Karena dengan jumlah lulusan yang menjamur harus diimbangi dengan kualitas lulusan yang mumpuni. Dari data di Kemeristek Dikti, sampai 23 November 2018 ini ada ribuan Program Studi Ekonomi untuk jenjang S1 (Forlap.ristekdikti.go.id, 2018) yang dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4. jumlah prodi/jurusan Ekonomi di bawah Kemenristek Dikti

No	Nama Prodi/Jurusan	Lokasi	Jenjang	Total
1	Ekonomi	Jawa Tengah	S1	165
2	Ekonomi	DIY	S1	78
3	Ekonomi	Nasional	S1	2.073

Sumber: Data Forlap Dikti 23 November 2018.

Sedangkan dari data Pendidikan Tinggi Islam (Dikti) Kemenag, sampai 23 November 2018 (Diktis.kemenag.go.id, 2018) untuk jenjang S1 dan DIII yang serumpun bidang ilmu Ekonomi Islam dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 5. jumlah prodi/jurusan serumpun Ekonomi Islam di bawah Diktis Kemenag RI

No	Nama Prodi/Jurusan	Jenjang	Total
1	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	S1	74234

2	Hukum Bisnis Syariah	S1	74234
3	Zakat dan Waqaf	S1	74236
4	Ekonomi Syari'ah/Islam	S1	60202
5	Keuangan Syariah	S1	60204
6	Manajemen Keuangan Syariah	S1	61211
7	Manajemen Bisnis Syariah	S1	61211
8	Keuangan Syariah	DIII	60404
9	Perbankan Syariah	S1	61206
10	Perbankan Syariah	DIII	61406
11	Asuransi Syariah	S1	94204
12	Akuntansi Syariah	S1	62202
13	Akuntansi Syariah	DIII	62402
14	Akuntansi Bank Syariah	S1	62204
15	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	S1	62201
16	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	DIII	62401
17	Profesi Akuntan	Profesi	62901
	Jumlah		1117063

Sumber: Data Dikti Kemenag 23 November 2018.

Perguruan tinggi harus menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 ini dengan melakukan beberapa penguatan. Pertama, pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, pusat pengembangan inovasi bekerjasama dengan sektor industri. Ketiga, pusat studi dengan sistem pembelajaran berjenjang, tersistem. Keempat, urgensi program pengembangan karakter. Kelima, menjadi wadah interaksi sosial antara pelajar dengan pengajar yang memanfaatkan teknologi (Irawan, 2018, p. 26).

Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM tersebut ditujukan terhadap seluruh pihak yang berperan aktif dalam pengembangan dan operasional perbankan syariah, yang antara lain meliputi pengelola bank syariah, pengawas bank syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah, termasuk perguruan tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, dari sisi kuantitas, industri perbankan syariah telah berupaya meningkatkan jumlah tenaga kerja perbankan Syariah. Pada tahun 2013 tercatat hanya 40.101 orang tenaga kerja pada perbankan syariah, dan meningkat menjadi 60.365 orang tenaga kerja pada tahun 2017. Namun jika dilihat perkembangannya, pertumbuhan tenaga kerja perbankan syariah cenderung stagnan sejak tahun 2015 (Luci Irawati dkk, 2017: 49)

Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, OJK (ojk.go.id, 2017: 48–49) memiliki beberapa program.

1. Membentuk Kelompok Kerja/Bidang Ekonomi Syariah Forum Rektor Indonesia terkait Penyusunan Kurikulum Keuangan Syariah
2. Menyelenggarakan *Training for Trainers* Keuangan Syariah
3. Mengembangkan Program Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan
4. Melakukan Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi untuk Mencetak SDM yang Andal
 - a. Mengembangkan Materi Keuangan Syariah dan Memberikan Kegiatan *Training for Trainers* bagi Akademisi
 - b. Melakukan Riset di Bidang Keuangan Syariah
 - c. Mendorong Program *Link and Match* untuk Kebutuhan SDM di Bidang Keuangan Syariah
5. Memberdayakan Asosiasi Industri dalam Peningkatan Kualitas SDM Keuangan Syariah

Di sisi lain, penguatan SDM di perguruan tinggi ini bisa dilakukan dengan beberapa terobosan. Pertama, penguatan kurikulum mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) di tiap Prodi Ekonomi Syariah. Kurikulum ini harus menasar pada produk, bermuatan literasi abad 21, dan berorientasi pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna menyiapkan SDM yang ke depan berkecimpung di dunia LKS. Kurikulum mengacu KKNI-SNPT harus benar-benar terlaksana dan tidak sekadar “rasa KKNI-SNPT” saja. Kurikulum ini sangat relevan karena berbasis produk, *event*, berpusat pada mahasiswa, dan mengandung kecirian di masing-masing perguruan tinggi.

Kedua, pembelajaran yang berorientasi pada *contextual learning* di lapangan khususnya pada Prodi Ekonomi Syariah yang bisa bekerjasama dengan LKS. Model PPL/KKN harus menasar secara menyeluruh dari aspek manajemen, sampai strategi pengembangan di setiap LKS. Sebab

selama ini kebanyakan LKS *close management* ketika ada mahasiswa PPL/KKL di tempat tersebut. Hal ini sangat penting, karena manajemen dalam pelatihan para mahasiswa menjadi indikator kesuksesan dalam menyiapkan *output* maupun *outcomes* SDM berkualitas (Makhrus, 2015: 65)

Ketiga, sinergitas dengan OJK maupun LKS dalam menguatkan *Training of Trainers* (TOT) keuangan syariah, bisa melalui workshop, lokakarya, Diklat, seminar, FGD, dan lainnya. Selama ini, ToT Keuangan Syariah DPBS-OJK dengan Direktorat Pasar Modal Syariah dan Direktorat Industri Keuangan Non Bank Syariah masih terbang pilih dan belum merata.

Pada tahun 2016 ToT Keuangan Syariah dilaksanakan di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Politeknik Keuangan Negara (PKN/STAN) Tangerang dan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Sementara berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2017, pada tahun 2017 ToT Keuangan Syariah dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau (Luci Irawati dkk, 2017: 88).

Ke depan, OJK harus menysasar ke perguruan tinggi swasta baik di bawah Kemenristek Dikti atau Kemenag. Pasalnya, banyak sekali perguruan tinggi membutuhkan sentuhan edukasi dalam menguatkan SDM melalui ToT Keuangan Syariah. Mengapa urgen? Karena setiap perguruan tinggi perlu melakukan peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan di luar jam perkuliahan.

Perlu juga kerjasama yang menguatkan pada sertifikasi profesi yang menjembatani mahasiswa dapat menjadi “tenaga profesional” di bidang ekonomi syariah. Dengan menggandeng asosiasi profesi, OJK, dan LKS, maka SDM yang digembleng di perguruan tinggi tersebut benar-benar berkualitas.

Keempat, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan di luar negeri. Bisa dalam ranah pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kerjasama ini menjembatani mahasiswa untuk melakukan magang di luar negeri, praktik nyata di lapangan, dan mengembangkan riset-riset terbaru sesuai kebutuhan zaman.

Strategi Literasi Keuangan di Perguruan Tinggi

Strategi selanjutnya adalah jangka pendek yang bisa dilakukan di perguruan tinggi dengan cara menguatkan literasi keuangan pada mahasiswa. Jika strategi pertama hanya terbatas pada prodi/jurusan

ekonomi/ekonomi syariah, namun literasi keuangan ini dapat dilakukan semua perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan DIY.

Meski secara kuantitatif jumlah di atas tergolong banyak, akan tetapi tingkat literasi dan keuangan syariah di Jawa Tengah dan DIY tergolong rendah. Survei literasi dan inklusi keuangan OJK tahun 2018, menemukan Jawa Tengah sebesar 11,17% dan 13,77%. Sedangkan DIY, tingkat literasinya sebesar 9,45% dan inklusinya sebesar 13,45%. Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan secara umum dimana literasi dan inklusi di Jawa Tengah mencapai 33,51% dan 66,23%. Sedangkan literasi dan inklusi di DIY sebesar 38,55% dan 76,79%. Rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan industri jasa keuangan syariah.

Dalam menjawab tantangan Era Revolusi Industri 4.0 dan guna mendapatkan kesempatan menjadi SDM kompetitif, pendidikan tinggi harus membekali mahasiswa dan lulusannya dengan *lifelong education* berupa literasi baru, yaitu *big data* dan *programming*, literasi teknologi dan literasi manusia (Paristiyani Nurwadani, 2018: 4).

Ada beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Salah satu bentuk itu adalah program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat (Halim Alamsyah, 2012: 3).

Untuk itu, literasi keuangan ini dapat dilakukan dengan beberapa formula. Pertama, penguatan literasi keuangan pada wilayah aksi nyata. Caranya, dengan melakukan literasi keuangan menyeluruh di semua perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa melakukan edukasi, promosi, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis ekonomi syariah.

Kegiatan edukasi atau pendidikan ini merupakan strategi mendasar menumbuhkan pemahaman terhadap ekonomi syariah pada umumnya dan bank syariah pada khususnya. Kegiatan edukasi ini harus menjadi strategi bersama baik pemerintah melalui kementerian terkait (Anny Ratnawati, 2011: 13). Untuk itu, literasi keuangan sangat strategis dilakukan terutama di perguruan tinggi karena saat ini hampir semua mahasiswa membutuhkan produk bank syariah.

Kedua, penguatan literasi keuangan berbasis literasi baru yang menasar pada kemampuan literasi data, teknologi, dan literasi manusia. Pasar kerja saat ini membutuhkan berbagai kombinasi *skills*, 80% perusahaan mencari jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja baik di dalam

tim. Kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (*big data*) di dunia digital masih kurang, oleh karena itu kita harus mengisi kekurangan tenaga kerja dalam bidang digital

Di Era Revolusi Industri 4.0 kita perlu mengembangkan literasi baru yaitu data, teknologi dan SDM. Literasi data mengharuskan mahasiswa dapat memanfaatkan dan mengolah data, menerapkannya kedalam teknologi dan tentunya kita harus memahami cara penggunaan teknologi tersebut. Literasi teknologi merupakan pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan pilar literasi dari konvensional menuju digital dengan ruh melek, dan ramah dalam membaca, menulis, dan menyebarkan informasi. Jika ditarik ke teknis perkuliahan, literasi teknologi bisa dimasukkan ke dalam matakuliah Aplikasi Komputer, Multimedia Pembelajaran, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Bahasa Indonesia Dasar dan Lanjutan, Karya Tulis Ilmiah, Pembelajaran Literasi dan lainnya.

Literasi SDM menjadi akhir dari literasi data dan teknologi. Sebab, perguruan tinggi dalam menyambut Era Revolusi Industri 4.0 ini diharuskan mencetak generasi yang melek literasi data dan teknologi (Ahmadi, 2018). Literasi manusia menjadi penting untuk bertahan di era ini, tujuannya adalah agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia dan dapat memahami interaksi dengan sesama manusia. Kampus perlu mencari metode untuk mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa, yaitu *higher order mental skills*, berpikir kritis dan sistemik karena penting untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0 (Ristekdikti, 2018).

Jika disinkronkan dengan literasi keuangan, maka semua kegiatan edukasi tentang keuangan syariah tidak boleh sebatas “penyadaran”. Namun harus melibatkan mahasiswa turut meneliti, mengembangkan, dan melakukan inovasi terhadap produk-produk keuangan syariah agar dapat berkembang sesuai *basic need* (kebutuhan dasar) mahasiswa itu sendiri.

Mahasiswa juga harus dikuatkan dalam kemampuan literasi data. Sebab, ketika mereka lulus, literasi data perusahaan merupakan kemampuan karyawan perusahaan untuk membaca, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk keputusan, serta mengkomunikasikan dan menggunakan pengetahuan data tersebut dalam pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Selain memiliki tenaga kerja literasi data, organisasi harus memastikan keterampilan ini digunakan pengambilan keputusan di seluruh bisnis untuk bersaing dalam Revolusi Industri 4.0.

Meskipun korelasi yang jelas antara nilai perusahaan dan korelasi data, ada kesenjangan antara bagaimana perusahaan merasakan pentingnya dan relevansi dari sebuah data, serta bagaimana mereka secara aktif meningkatkan literasi data tenaga kerja. Sementara 92% pengambil

keputusan bisnis percaya bahwa penting bagi karyawan untuk literasi data, hanya 17% melaporkan bahwa bisnis mereka secara signifikan mendorong karyawan menjadi lebih percaya diri dengan data (Duniafintech.com, 2018).

Ketiga, memperbanyak kegiatan berupa sosialisasi, seminar, kuliah umum, atau berbasis praktik lapangan yang mengombinasikan kerjasama antara kampus, OJK, LKS, dan dinas-dinas terkait. Keempat, melakukan inovasi berbasis riset pada produk-produk ekonomi syariah yang jarang dijamah. Seperti contoh wisata syariah (alam, religi, kuliner, budaya), *e-commerce*, dan lainnya.

Kelima, kerjasama paten dan kontinu antara perguruan tinggi dan LKS dengan membuat "simpanan mahasiswa" (Sima). Strategi ini sangat potensial karena melihat jumlah perguruan tinggi di Indonesia melimpah dan mahasiswa menjadi mandiri dan yakin ketika memiliki tabungan berbasis syariah. Hal ini sudah diterapkan di jenjang SD-SMA yang berbentuk "simpanan pelajar" atau Simpel yang sudah diterapkan di beberapa daerah.

Keenam, beasiswa pendidikan atau kredit pendidikan yang menjadi produk dari LKS itu sendiri. Bagi mahasiswa mampu tentu aman-aman saja ketika membayar SPP, namun bagi yang miskin, sangat membutuhkan bantuan dari LKS yang itu sangat membantu mahasiswa.

Pada poin ini intinya, LKS harus melebarkan dan menginovasi produk layanan syariah untuk pendidikan. Produk layanan syariah tidak hanya sebatas *wadiah* (simpanan), *musyarakah* (akad kerjasama), *muzara'ah* (kerjasama pengelohana pertanian), *murabahah* (perjanjian jual beli antara bank dan nasabah) dalam bisnis saja, namun juga perlu menyasar pada pendidikan tinggi dengan model beasiswa atau simpanan pendidikan.

Literasi dan inklusi keuangan syariah bagaikan dua keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Semua kegiatan literasi keuangan di atas harus menghasilkan produk atau capaian nyata dengan mendorong mahasiswa bahkan mewajibkannya untuk menggunakan produk layanan syariah. Semua itu tidak akan tercapai ketika tidak ada konsistensi perguruan tinggi dan juga LKS yang ada.

SIMPULAN

Kemajuan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat ditentukan peran perguruan tinggi. Maka perguruan tinggi harus melakukan strategi jangka panjang dan pendek. Jangka panjang dilakukan dengan penyiapan

SDM berkualitas khusus prodi/jurusan ekonomi/ekonomi syariah atau sesuai disiplin ilmu Ekonomi Islam.

Pertama, penguatan kurikulum mengacu KKNI-SNPT. Kedua, pembelajaran yang berorientasi pada contextual learning di lapangan khususnya pada Prodi Ekonomi Syariah yang bisa bekerjasama dengan LKS. Ketiga, sinergitas dengan OJK maupun LKS dalam menguatkan Training of Trainers (TOT) keuangan syariah, bisa melalui workshop, lokakarya, Diklat, seminar, FGD, dan lainnya. Keempat, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan di luar negeri. Bisa dalam ranah pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Sedangkan jangka pendeknya, dapat dilakukan dengan penguatan literasi keuangan. Pertama, penguatan literasi keuangan pada wilayah aksi nyata. Kedua, penguatan literasi keuangan berbasis literasi baru yang menasar pada kemampuan literasi data, teknologi, dan literasi manusia. Ketiga, memperbanyak kegiatan berupa sosialisasi, seminar, kuliah umum, atau berbasis praktik lapangan yang mengombinasikan kerjasama antara kampus, OJK, LKS, dan dinas-dinas terkait. Keempat, melakukan inovasi berbasis riset pada produk-produk ekonomi syariah yang jarang dijamah. Seperti contoh wisata syariah (alam, religi, kuliner, budaya), e-commerce, dan lainnya. Kelima, kerjasama paten dan kontinu antara perguruan tinggi dan LKS dengan membuat "simpanan mahasiswa". Keenam, beasiswa pendidikan atau kredit pendidikan yang menjadi produk dari LKS itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, F. (2018). "Menyongsong Era Literasi Baru." *Unnes.Ac.Id*. Retrieved from unes.ac.id/gagasan/menyongsong-era-literasi-baru/
- Al-Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktik*. (Anwar Abbas, Ed.) (1st ed.). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anny Ratnawati. (2011). "Potensi dan Strategi Pengembangan Bank Syari'ah Di Indonesia: Kajian Produk Syari'ah dari Segi Fiqih Mu'amalat". *JHI*, 9. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/37022-ID-potensi-dan-strategi-pengembangan-bank-syariah-di-indonesia-kajian-produk-syaria.pdf>
- Diktis.kemenag.go.id. (2018). "Daftar Program Studi PTKI." Jakarta. Retrieved from http://diktis.kemenag.go.id/bansos/cari_prodi.php
- Duniasfintech.com. (2018). "Penelitian Baru Terkait Literasi Data dalam Perusahaan." Jakarta. Retrieved from <https://www.duniasfintech.com/penelitian-literasi-data/>
- Forlap.ristekdikti.go.id. (2018). "Grafik Jumlah Program Studi." Jakarta. Retrieved from <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphprodi>
- Ghozali, K. F. J. M. (2018). "Penerapan Sistem Ekonomi Syari'ah di Negara Minoritas Muslim". *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6, 109-123. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v6i1.3555>
- Halim Alamsyah. (2012, April). "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015." *Bank Indonesia*, pp. 1-8. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966perkempa>

nganprospekperbankansyariahindonesiamea201.pdf.

Ibda, H. (2018). "Penguatan Literasi Baru pada Guru Madrasah Ibtidaiyah dalam Menjawab Tantangan Era Revolusi Industri 4.0." *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, 1, 1-21.

Irawan, J. F. P. (2018, February). "Tantangan bagi Perguruan Tinggi dalam Menyongsong Era Digital." *Universitas Katolik Parahyangan*, pp. 1-30. Retrieved from <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/5318>

Lubis, S. K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam (III)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Luci Irawati dkk. (2017). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017* (1st ed.). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Makhrus. (2015). "Peran Perguruan Tinggi dalam Mendorong Pengembangan Sumber Daya Insani pada Lembaga Keuangan Syariah." *ISLAMIDINA*, XV, 52-66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.1663>

Muhammad. (2002). *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (1st ed.). Yogyakarta: Ekonisia FC UII.

Muhammad Asidicky. (2017, December). "Lembaga Keuangan Syariah." *Tempo.Co*. Retrieved from <https://indonesiana.tempo.co/read/120280/2017/12/10/muhammadasidicky02/lembaga-keuangan-syariah>.

Nofinawati. (2015). "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 14, 167-183. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1234/juris.v14i2.305>

ojk.go.id. (2017). "Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019." Jakarta. Retrieved from <http://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan->

Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx.

OJK. (2017). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019* (1st ed.). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

OJK. (2018). *Statistik Perbankan Syariah Agustus 2018* (1st ed.). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2018/SPS Agustus 2018.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2018/SPS%20Agustus%202018.pdf).

Paristiyani Nurwadani. (2018). "Orasi Ilmiah Dies Natalis Ke-25 Fakultas Industri dan Fakultas Informasi dan SAINS." *Unpar.Ac.Id*. Retrieved from [http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/5583/Orasi Dies FTI dan FTIS 25_2018_Paristiyanti_Strategi Pembelajaran Sains-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/5583/Orasi%20Dies%20FTI%20dan%20FTIS%2025_2018_Paristiyanti_Strategi%20Pembelajaran%20Sains-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Rahayu, H. (2005). "Definisi Lembaga Keuangan Syariah." *Academia.Edu*. Retrieved from https://www.academia.edu/8524184/Definisi_Lembaga_Keuangan_Syariah

Ristekdikti, B. (2018, January). "Era Revolusi Industri 4.0: Perlu Persiapkan Literasi Data, Teknologi dan Sumber Daya Manusia." *Belmawa.Ristekdikti.Go.Id*. Retrieved from belmawa.ristekdikti.go.id/2018/01/17/era-revolusi-industri-4-0-perlu-persiapkan-literasi-data-teknologi-dan-sumber-daya-manusia

Yahya, M. (2018). "Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia." In *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Professor Tetap*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Yohanes Enggar Harususilo. (2018, July). "Menristek: Mahasiswa Harus Kuasai Literasi Baru, Apa Saja?" *Kompas.Com*. Retrieved from

<https://edukasi.kompas.com/read/2018/07/17/22471971/menristek-mahasiswa-harus-kuasai-literasi-baru-apa-saja>

